



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

PENGEMBANGAN WISATA LOKAL DI KOMPLEKS PELABUHAN KOTA PROBOLINGGO DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT SERTA DIMEDIASI PEMERINTAH DAERAH

Supriyanto¹, Nurul Jannah Lailatul Fitria²

¹Administrasi Publik FISIP Universitas Panca Marga

Email: ¹supriyanto@upm.ac.id; ²nuruljannahlailatulfitria@gmail.com *

Abstract. *The development of local tourism can have an impact on the economy in the new industry. So cooperation between parties is needed in developing local tourism for the community's welfare. Especially in Probolinggo City, they are developing tourism in the Probolinggo City Port Complex. So researchers want to know the level of direct and indirect influence of community participation on local tourism development in the Probolinggo City Port Complex, which the Regional Government mediates. This research was conducted with a descriptive quantitative approach with the PLS technique. They collected data using a questionnaire of 96 respondents. So it can be seen that community participation (X) has no significant effect on local tourism development (Y) directly; the coefficient value is 0.187, the p-value is 0.428, and the t-statistic is 0.792. Community participation (X) in local tourism development (Y) indirectly through local government (M) has a significant effect on the coefficient value of - 0.210. The T-statistic value is 1.942, with a p-value of 0.050. Local government (M) on Local Tourism Development (Y) directly affects the coefficient value of -0.324. The T-statistic value is 2.102, with a p-value of 0.036.*

Keywords: *Community; Local Government; Port; Local Tourism.*

Abstrak. Pengembangan wisata lokal dapat memberikan dampak pada perekonomian dalam bidang industri baru (*new industry*). Diperlukan kerjasama antar pihak dalam pengembangan wisata lokal untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Probolinggo yang mengembangkan wisata di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo. Peneliti ingin mengetahui tingkat pengaruh langsung dan tidak langsung antara partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata lokal Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo yang mediasi oleh Pemerintah Daerah. Riset ini diselenggarakan dengan metode kuantitatif deskriptif melalui teknik PLS. Pengumpulan data menggunakan kuesioner kepada 96 responden. Diketahui partisipasi masyarakat (X) memberikan pengaruh pada pengembangan wisata lokal (Y) tidak secara langsung dengan nilai koefisien sejumlah 0,187, nilai *p-values* sejumlah 0,428, dan t-statistik sejumlah 0,792. Partisipasi masyarakat (X) pada pengembangan wisata lokal (Y) dengan mediasi pemerintah daerah (M) memberikan pengaruh signifikan dengan koefisien sejumlah -0,210, nilai T-statistik sejumlah 1,942 dengan *p-value* sejumlah 0,050. Pemerintah daerah (M) pada pembangunan wisata lokal (Y) secara langsung memberikan pengaruh signifikan nilai koefisien sejumlah -0,324, nilai T-statistik sejumlah 2,102 dengan *p-value* sejumlah 0,036.

Kata kunci: masyarakat; pemerintah daerah; pelabuhan; wisata lokal.



PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan *new industry* yang memberikan pengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi (Fadisa, Syamsurizaldi dan Koeswara, 2022). Sektor wisata menjadi aset penting yang mendukung pembangunan wilayah dengan potensi objek wisata (Walakula, 2020). Sektor wisata dapat membuka peluang kerja, menaikkan pemasukan, kesejahteraan, dan bahkan dapat memberdayakan usaha lokal. Pariwisata menjadi sumber utama devisa di Indonesia. Alasannya adalah Indonesia memiliki beragam variasi wisata. Keunikan wisata lokal Indonesia memiliki kekhasan yang dapat membuat wisatawan tertarik (Rukini dan Nawangsih, 2015).

Industri pariwisata mampu mengoptimalkan potensi sektor perekonomian. Bahkan pembangunan sektor wisata di Indonesia dilaksanakan dengan terpadu dengan menerapkan koordinasi lintas sektor. Tujuannya pembangunan wisata mencapai keberhasilan secara optimal. Strategi pengembangan wisata dengan melibatkan kolaborasi pemerintah dengan masyarakat, pihak swasta, dan pihak lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Khususnya pemerintah daerah memiliki peranan pada pengembangan wisata lokal.

Sektor wisata dikembangkan dengan pendekatan sistem kompleks, terpadu, dan membutuhkan partisipasi dengan adanya kriteria ekonomi, sosial budaya, hemat energi, dan ramah lingkungan. Pengembangan wisata membutuhkan kebijakan yang disesuaikan dengan kehidupan masyarakat lokal (Rahmi, 2016). Khususnya pembangunan wisata diorientasikan pada pembangunan berbasis masyarakat. Pembangunan wisata dengan melibatkan masyarakat akan terlaksana lebih efektif dan efisien (Sahadula *et al.*, 2017). Wisata dapat merubah kualitas hidup masyarakat di wilayah wisata, baik sarana prasarana, pelayanan, pendapatan, dan lainnya (Morissan, 2019).

Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan wisata lokal. Pemerintah memiliki kewenangan kebijakan dan pengawasan. Masyarakat harus berperan aktif dalam pengembangan wisata dengan memanfaatkan potensi lokal (Widyawati, 2018). Seperti di Kota Probolinggo, pemerintah daerah dan masyarakat lokal mengembangkan potensi lokal di Komplek Pelabuhan Kota Probolinggo dijadikan kompleks wisata. Di Kompleks Pelabuhan terdapat dua lokasi pelabuhan berdekatan yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga Kota Probolinggo dan Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo.

Wisata Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo meliputi wisata pesisir, wisata Kum-Kum (berendam air laut), wisata mencari pasir dan mencari kerang (saat surut air laut) wisata beralayar, dan lainnya. Wisata Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo terus dikembangkan oleh pemerintah Kota Probolinggo dengan melibatkan peran masyarakat Kota Probolinggo khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah Pelabuhan Kota Probolinggo.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata lokal dimediasi oleh pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pengembangan wisata di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo. Riset ini didasari rumusan masalah yakni: 1) bagaimana tingkat pengaruh langsung partisipasi masyarakat pada pembangunan wisata lokal di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo?; 2) bagaimana tingkat pengaruh tidak langsung dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wisata lokal di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo?; 3) bagaimana tingkat pengaruh langsung pemerintah daerah terhadap pembangunan wisata lokal di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo ?

Tujuan riset ini adalah untuk: 1) mengetahui tingkat pengaruh langsung partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wisata lokal di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo; 2) untuk mengetahui tingkat pengaruh tidak langsung dari partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wisata lokal di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo; dan 3) untuk mengetahui pengaruh langsung pemerintah daerah terhadap pembangunan wisata lokal di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat merupakan adanya peran masyarakat untuk ikut membangun, baik pada tahap perencanaan, penerapan, hingga evaluasi, bahkan sebagai penerima manfaat adanya pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan kesempatan masyarakat dalam program pembangunan dengan efektif. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam usaha nyata maupun pernyataan (*ide*) yang ditindak-lanjuti pada pelaksanaan program (Meray, Tilaar dan Takumansang, 2016). Partisipasi masyarakat merupakan proses pelaksanaannya peran komunitas masyarakat maupun individu dalam perancangan, penyelenggaraan, dan pengawasan kebijakan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, masyarakat menjadi subjek bukan sebagai objek pembangunan (Palimbunga, 2017). Hal ini dapat dikenal "*genuine participation*".

Terdapat tingkatan partisipasi masyarakat, meliputi *manipulation participation*, *passive participation*, *consultation participation*, *incentive participation*, *functional participation*, *interactive participation*, *initiative participation* (Oktami, 2013). Usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya; mengeksplor keahlian personal; dan berpartisipasi langsung dalam membentuk keputusan dan menerapkan pengawasan. Bentuk partisipasi seperti kontribusi tenaga, waktu, dan materi lokal dengan sukarela. Seluruh bentuk kontribusi digunakan untuk dukungan program dan proyek.

Pengembangan Wisata Lokal

Pengembangan wisata memberikan perubahan pada suatu wilayah. Perubahan dapat mengarah pada hal positif ataupun negatif (Palimbunga, 2017). Jika pengembangan wisata mengikuti prosedur yang tepat maka pengembangan wisata mengarah pada perubahan positif. Begitu juga sebaliknya, bahkan pengembangan wisata tanpa perencanaan dan struktur yang tepat dapat memberikan kerugian.

Adanya pengembangan wisata dapat memberikan manfaat bagi wisatawan dan masyarakat lokal baik ekonomi, sosial, budaya, sejarah, dan lingkungan. Khususnya pembangunan wisata yang berkelanjutan. Agar masyarakat lokal, sumber daya, lingkungan dan sosial budaya bukan menjadi korban pembangunan justru akan menerima manfaat pembangunan wisata secara optimal (Meray, Tilaar dan Takumansang, 2016). Pengembangan wilayah wisata berkaitan dengan pengembangan dan eksplorasi potensi wisata lokal (Adityaji, 2018). Aktivitas pariwisata akan berhubungan dengan budaya dan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat (Komariah, Saepudin dan Yusup, 2018).

Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan dasar otonomi daerah dan tugas pembantuan yang relevan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dapat melakukan intervensi perlindungan indikasi geografis (Munawaroh, 2019). Alasannya, produk yang dibutuhkan oleh masyarakat membutuhkan perlindungan indikasi geografis serta mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dengan adanya kekayaan alam dan budaya yang bervariasi. Dalam hal ini, letak geografis Indonesia memiliki

karakteristik indikasi geografis. Indonesia sangat potensial dalam perdagangan internasional, dan termasuk dalam WTO dan *Trips agreement*. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan daerah (Simarmata, 2015), termasuk pada kebijakan pembangunan wisata lokal.

METODE

Jenis Penelitian

Riset ini menerapkan riset kuantitatif, bentuk riset dengan analisa melalui pengolahan angka. Riset kuantitatif dengan data dan informasi yang menerapkan instrumen riset serta analisa data secara kuantitatif. Dilanjutkan dengan uji hipotesa yang telah ditentukan (Sugiyono, 2018).

Hipotesis pada riset ini meliputi:

H1: Diduga terdapat pengaruh langsung partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata

H2: Diduga terdapat pengaruh tidak langsung partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata

H3: Diduga terdapat pengaruh langsung pemerintah daerah terhadap pengembangan wisata.

Lokasi Penelitian

Lokasi riset merupakan objek kegiatan riset diselenggarakan. Lokasi riset digunakan untuk memberikan kemudahan dan menjelaskan objek riset. Riset ini dilakukan di Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo. Tepatnya di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah objek riset dengan kualitas dan kriteria khusus yang ditentukan guna pengolahan dan pengkajian. Populasi riset ini adalah masyarakat di Kota Probolinggo yang berdomisili di Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, Jawa Timur.

Sampel merupakan sebagian yang dapat mewakili dari jumlah populasi dan karakteristik populasi (Sugiyono, 2019). Sampel ini ditetapkan dengan alasan tidak memungkinkan melakukan riset untuk keseluruhan populasi. Sampel ditentukan dengan rumus:

$$n = \left(\frac{M\alpha/2 \sigma}{e} \right)^2$$

Keterangan:

n = total sampel

M α /2 = nilai tabel normal

e = standar *error*

σ = standar deviasi populasi

Tingkat kepercayaan dalam riset ini sebesar 95% dengan standar *error* ditetapkan sebesar 5% (0,05), maka nilai $M\alpha/2 = 1,96$ dan standar deviasi populasi adalah sebesar 0,25, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \left(\frac{1,96 \cdot 3,25}{0,05} \right)^2$$

$$= \left(\frac{0,49}{0,05} \right)^2$$

$$= (9,8)^2 = 96$$

Maka ditentukan jumlah sampel dengan 96 orang.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel pada riset ini menerapkan teknik *non probability sampling*. *Non probability sampling* merupakan cara menghimpun sampel dengan tidak memberikan peluang yang sama untuk setiap populasi (Sugiyono, 2018). Metode *nonprobability sampling* dengan *accidental sampling* yakni cara pengambilan sampel secara tidak sengaja dan wajib memenuhi kriteria yang sesuai dengan sumber data.

Sumber data merupakan subjek dalam mendapatkan data dan informasi. Data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2019) melalui kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Data sekunder merupakan sumber data yang dihimpun secara tidak langsung oleh peneliti (Sugiyono, 2019). Data sekunder dihimpun dari studi pustaka seperti kumpulan literasi, buku, jurnal ilmiah dan website serta arsip regulasi dan deskripsi terkait Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam riset. Menghimpun data merupakan proses mendapatkan data guna kebutuhan riset. Metode penghimpunan data merupakan cara yang diterapkan peneliti dalam menghimpun data (Sugiyono, 2019). Cara penghimpunan data yang diterapkan pada riset ini adalah: 1) kuesioner yaitu cara menghimpun data melalui pembagian daftar pernyataan yang dinilai menggunakan skala likert kepada responden; 2) wawancara yaitu bentuk dialog antara peneliti dan subjek riset guna memahami sudut pandang dan penilaian responden terkait fenomena; 3) pengamatan (observasi) yaitu cara menghimpun data yang diterapkan dengan mengamati secara langsung guna mendapatkan data secara nyata, detail, dan *real time*; 4) dokumentasi seperti arsip tertulis, foto, atau karya monumental. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai pelengkap dan bukti pendukung dari kuesioner, wawancara dan observasi.

Devnisi Operasional Variabel

Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini: 1) Variabel Dependen yakni variabel yang masuk pada hipotesis yang telah disepakati dan ada pengaruh variabel lain; 2) Variabel Independen yakni variabel bebas yang dapat memberikan pengaruh pada variabel terpengaruh; 3) Variabel Intervening yakni variabel yang memediasi hubungan variabel dependen dan variabel independen.

Variabel	Definisi Variabel	Parameter	Skala
Partisipasi Masyarakat (X)	Partisipasi Masyarakat pada konsep pembangunan dapat diterapkan dengan 4 langkah untuk memberikan keluwesan dan acuan pada masyarakat menurut Sufian (2003) dalam Welasari & Ardiansyah (2015)	<ol style="list-style-type: none"> Sumbangan Pemikiran Sumbangan tenaga Sumbangan dana Sumbangan dalam pengawasan 	Likert
Pembangunan Wisata Komunitas Lokal (Y)	Pengembangan wisata alat dan sarana pengembangan masyarakat yang memperkuat daya komunitas lokal dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di wisata disertai partisipasi komunitas lokal menurut APEC (2009) dalam Permatasari (2022)	<ol style="list-style-type: none"> Identifikasi kebutuhan dan kesiapan masyarakat terhadap aktifitas pariwisata Identifikasi kemampuan dan kesiapan komunitas Peran pemimpin dan organisasi Persiapan dan Pengembangan organisasi pada lingkup wisata Pengembangan kemitraan Pendekatan terpadu yang diselenggarakan Rencana dan daerahin Permintaan pasar dan promosi Proses penyelenggaraan dan pengawasan wilayah wisata 	Likert
Pemerintah Daerah (M)	Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pemerintah nasional (pusat) dalam menyelenggarakan untuk pembangunan (Atmoko, Mardiyono and Sukanto, 2013) (Firdaus, 2020)	<ol style="list-style-type: none"> Peran Stabilisator Peran Pelopor Peran Inovator Peran Katalisator Peran Regulator Peran Dinamisator Peran Fasilitator 	Likert

Skala Pengukuran

Riset ini menerapkan skala ukur *likert* yang jenis pengukuran pada variabel riset. Pengukuran variabel riset dengan *skala likert* dipaparkan pada indikator variabel dalam item instrumen yang berbentuk pernyataan ataupun pertanyaan. Terdapat lima indikator jawaban yakni sangat tidak setuju (1); tidak setuju (2); netral (3); setuju (4); dan sangat setuju (5).

Analisis Data

Analisis data pertama pada riset ini adalah analisis deskriptif data. Tujuannya adalah untuk menginterpretasikan argumen responden terhadap jawaban dari kuesioner. Bentuk analisa pada riset ini merupakan proses transisi data riset pada bentuk tabulasi guna memberikan peneliti kemudahan dalam pemahaman dan penginterpretasikan data.

Analisis data kedua pada riset ini adalah analisis PLS (*Partial Last Square*). Analisis PLS adalah bentuk statistika multivariate yang diterapkan guna membandingkan setiap variabel dependen dan independen.

Uji Instrumen

Pengujian instrumen pada riset ini menggunakan tiga jenis pengujian. Pertama, pengujian validitas untuk mengetahui kevalidan data yang akan dilanjutkan untuk penarikan kesimpulan. Kedua, pengujian reliabilitas guna mengetahui instrumen dapat dipercaya. Ketiga, penguian mediasi untuk pengujian yang menggunakan uji sobel test. Pengujian sobel test digunakan untuk menguji signifikasi variabel X ke variabel Y dengan mediasi variabel M.

HASIL DAN DISKUSI

Evaluasi Model

Outer Model

Outer model merupakan penilaian dan penentuan reliabilitas dan validitas setiap indikator variabel laten. Pengevaluasian model ukur dengan bentuk reflektif melalui pengujian *convergent validity*, *diskriminan validity* dan *reliability composi*.

Convergent validity

Convergent validity adalah bentuk pengujian hubungan setiap indikator reflektif pada variabel latennya. Indikator tergolong valid atau absah dalam kriteria *convergent validity* jika nilai *loading factor* > 0.5.

Variabel	Indikator	Loading Factor	Status
----------	-----------	----------------	--------

Partisipasi Masyarakat	X1	0,767	Absah
	X2	0,735	Absah
	X3	0,781	Absah
	X4	0,788	Absah
	X5	0,771	Absah
	X6	0,681	Absah
	X7	0,752	Absah
	X8	0,750	Absah
	X9	0,811	Absah
	X10	0,822	Absah
Pembangunan Wisata Lokal	Y1	0,813	Absah
	Y2	0,825	Absah
	Y3	0,735	Absah
	Y4	0,740	Absah
	Y5	0,836	Absah
	Y6	0,747	Absah
	Y7	0,741	Absah
	Y8	0,691	Absah
	Y9	0,714	Absah
Pemerintah Daerah	M1	0,837	Absah
	M2	0,818	Absah
	M3	0,703	Absah
	M4	0,748	Absah
	M5	0,886	Absah
	M6	0,735	Absah
	M7	0,726	Absah

Pada olah data terkait nilai *loading factor* setiap indikator variabel partisipasi masyarakat (X), pengembangan wisata lokal (Y), dan pemerintah daerah (M) nilainya adalah diatas 0,5. Maka indikator tersebut tergolong valid atau absah untuk dapat menjadi alat ukur variabel laten.

Discriminant validity

Discriminant validity pada riset menerapkan nilai *cross loading* dan *square root average (AVE)* guna mengetahui instrumen riset tergolong valid atau absah dalam memaparkan penjelasan atau perfleksian variabel laten.

Variabel	Partisipasi Masyarakat	Pengembangan Wisata	Pemerintahan Daerah	Status
X1	0,767	-0,173	0,057	Absah
X2	0,735	-0,109	0,039	Absah
X3	0,781	-0,070	0,077	Absah
X4	0,788	-0,048	0,081	Absah

X5	0,771	-0,123	0,086	Absah
X6	0,681	-0,065	0,134	Absah
X7	0,752	-0,123	0,082	Absah
X8	0,750	-0,104	0,180	Absah
X9	0,811	-0,082	0,227	Absah
X10	0,822	-0,077	0,212	Absah
Y1	-0,179	0,813	-0,088	Absah
Y2	-0,174	0,825	-0,088	Absah
Y3	-0,051	0,735	-0,121	Absah
Y4	-0,113	0,740	-0,073	Absah
Y5	-0,100	0,836	-0,262	Absah
Y6	0,085	0,747	-0,098	Absah
Y7	-0,096	0,741	-0,124	Absah
Y8	-0,084	0,691	-0,093	Absah
Y9	-0,067	0,714	-0,095	Absah
M1	0,197	-0,158	0,837	Absah
M2	0,114	-0,153	0,818	Absah
M3	0,106	-0,086	0,703	Absah
M4	0,165	-0,128	0,748	Absah
M5	0,177	-0,134	0,886	Absah
M6	0,077	-0,114	0,735	Absah
M7	0,081	-0,175	0,726	Absah

Pengujian *discriminant validity* pada tabel di atas menunjukkan hasil uji *cross loading* dari variabel partisipasi masyarakat (X), pengembangan wisata lokal (Y), dan Pemerintah Daerah (M) memiliki nilai diatas standart *cross loading* dari variabel laten lainnya. Seluruh nilai lebih dari 0.5, maka instrumen riset secara diskriminan tergolong valid atau absah. Pengukuran variabel dengan teknik pembandingan nilai AVE menunjukkan nilai AVE yang memiliki nilai diatas 0.5 maka variabel tergolong dalam *discriminant validity* yang baik.

Variabel	\sqrt{AVE}	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	0,767	Absah
Pengembangan wisata lokal	0,762	Absah
Pemerintahan Daerah	0,781	Absah

Berdasarkan tabel di atas, hasil nilai \sqrt{AVE} memaparkan variabel partisipasi masyarakat (X), pengembangan wisata lokal (Y), dan pemerintah daerah (M) memiliki nilai \sqrt{AVE} diatas nilai 0,5. Sehingga variabel tersebut tergolong valid atau absah.

Composite Reliability

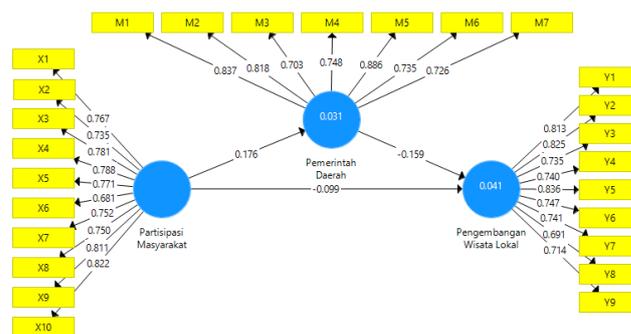
Composite reliability merupakan pengukuran model dan nilai *cronbach's alpha*. Model tergolong reliabilitas alasannya nilai *composite reliability* berada melebihi 0.7 dan nilai *cronbach's alpha* melebihi 0.6.

Variabel	Composite Reliability	Cronbach's alpha	Status
Partisipasi Masyarakat	0,934	0,925	Reliabelitas
Pengembangan wisata lokal	0,925	0,920	Reliabelitas
Pemerintahan Daerah	0,916	0,893	Reliabelitas

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai setiap variabel tergolong reliabilitas yang baik. Alasannya nilai setiap variabel lebih dari 0,70 untuk *composite reliability* dan lebih dari 0,6 untuk *cronbach's alpha*. Maka dapat dilanjutkan pada proses analisa dengan uji *goodness of fit* model melalui evaluasi *inner model*.

Inner Model

Inner model dilakukan guna mendapatkan prediksi hubungan antar variabel laten melalui nilai signifikansi dan *R-square* dari model riset.



Evaluasi model struktural PLS dimulai dengan nilai *R-square* variabel laten dependen. Nilai *R-Squares* dapat dimanfaatkan dalam menunjukkan dampak variabel laten eksogen mempengaruhi variabel laten endogen secara substantif.

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Pemerintahan Daerah	0,031	0,021
Pembangunan Wisata Lokal	0,041	0,020

Tabel di atas memaparkan nilai *R-Square* variabel pengembangan wisata lokal sebesar 0,041%. Nilai tersebut menunjukkan pengembangan wisata lokal dijelaskan dengan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah sebesar 4.1% dan nilai 95,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk pada riset ini. Sedangkan variabel pemerintah daerah menunjukkan nilai *R-Square* sebesar 0,031 menunjukkan pemerintah daerah dapat dijelaskan dengan partisipasi masyarakat

sebesar 3.1% dan nilai 96,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk pada riset ini.

Pengujian Hipotesis

Uji hubungan struktural merupakan bentuk penjelasan korelasi antara variabel pada riset. Uji model struktural diterapkan dengan pengujian melalui software PLS dan pengujian intervensi melalui Sobel Test. Pengujian hipotesis secara langsung melalui hasil luaran gambar serta nilai yang tertera di output *path coefficients*. Pengujian hipotesis secara langsung dengan nilai *p value* lebih besar dari nilai 0,05 (*significance level* = 5%), maka dapat tergolong pengaruh signifikan variabel eksogen pada variabel endogen.

Variabel	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T-Statistic (O/SD EV)	P-Value
Partisipasi Masyarakat -> Pengembangan Wisata Lokal	0,187	0,183	0,236	0,792	0,428
Partisipasi Masyarakat -> Pengembangan Wisata Lokal->Pemerintahan Daerah	-0,21	0,226	0,108	1,942	0,050
Pemerintahan Daerah -> Pengembangan Wisata Lokal	-0,324	0,342	0,154	2,102	0,036

Uji pengaruh parsial setiap korelasi hipotesa diterapkan penggunaan simulasi melalui metode *bootstrapping*. Pertama, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata lokal secara langsung. Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata lokal secara langsung dengan nilai koefisien sejumlah 0,187, nilai *p-values* sejumlah 0,428 dan *t-statistik* sejumlah 0,792. Nilai *p-values* 0,428 di atas nilai 0,05 serta nilai *t-statistik* sejumlah 0,792 di atas dari nilai *t-tabel* 1,64. Maka partisipasi masyarakat memberikan pengaruh tidak signifikan pada pengembangan wisata lokal. Sehingga hipotesis pengaruh partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata lokal secara langsung ditolak.

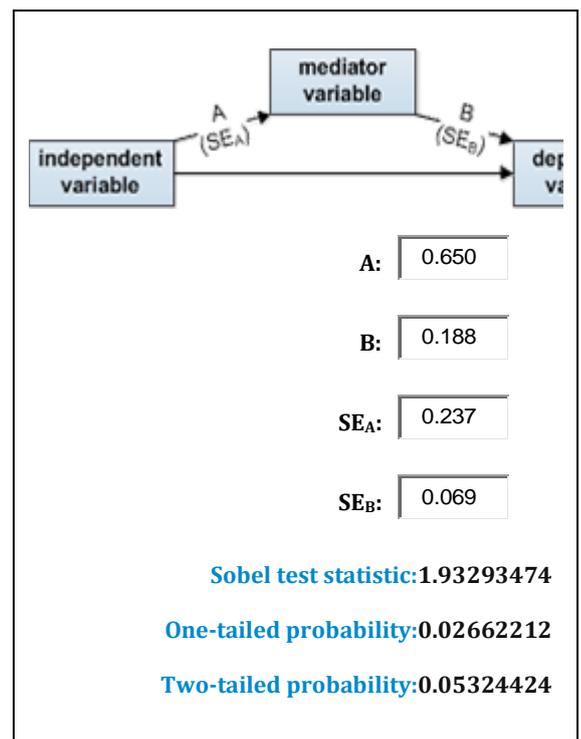
Kedua, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengembangan wisata lokal dengan

mediasi pemerintah daerah. Hipotesis pengaruh partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata lokal dengan mediasi pemerintah daerah. Uji hipotesis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata lokal dengan mediasi pemerintah daerah memiliki nilai koefisien sejumlah -0,21. Nilai *T-statistik* sebesar 1,942 dengan *p-value* sejumlah 0,050. Nilai *p-value* kurang dari 0,05 dan nilai *t-statistik* sejumlah 1,942 melebihi dari *t-tabel* 1,64. Maka partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata lokal dimediasi pemerintah daerah memberikan pengaruh yang signifikan dan hipotesis diterima.

Ketiga, pengaruh pemerintah daerah terhadap pengembangan wisata lokal secara langsung. Hipotesis pengaruh pemerintah daerah pada pengembangan wisata lokal secara langsung menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada pengembangan wisata lokal secara langsung memiliki nilai koefisien sejumlah -0,324. Nilai *T-statistik* sejumlah 2,102 dengan *p-value* sejumlah 0,036. Hasil memaprkan *p-value* kurang dari nilai 0,05 dan nilai *t-statistik* sejumlah 2,102 melebihi dari *t-tabel* 1,96. Maka pemerintah daerah pada pengembangan wisata lokal secara langsung memberikan pengaruh yang signifikan dan hipotesis diterima.

Uji Mediasi

Uji Mediasi diterapkan guna pendeteksian posisi variabel mediasi pada model. Uji mediasi diterapkan dengan uji Sobel menggunakan *Software Free Statistic Calculation for Sobel Test*.



Hasil pengujian mediasi memaparkan *sobel test statistic* guna korelasi partisipasi masyarakat dengan pengembangan wisata lokal sejumlah 1.93293474. Uji mediasi tertera memiliki nilai di atas dari t-tabel yaitu 1,64 dan nilai *One-tailed probability* 0.02662212 kurang dari 0,05. Maka pemerintah daerah sebagai mediasi pengaruh partisipasi masyarakat dengan pembangunan wisata lokal.

KESIMPULAN

Sesuai hasil analisa data dengan uji hipotesis terkait pengaruh partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata lokal dengan mediasi pemerintah daerah pada kasus Kompleks Pelabuhan Kota Probolinggo dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat (X) memberikan pengaruh tidak signifikan pada pengembangan wisata lokal (Y) secara langsung dan hipotesis ditolak. Sedangkan partisipasi masyarakat (X) pada pengembangan wisata lokal (Y) dengan mediasi pemerintah daerah (M) memberikan pengaruh signifikan dan hipotesis diterima. Terakhir, pemerintah daerah (M) pada pembangunan wisata lokal (Y) secara langsung memberikan pengaruh signifikan dan hipotesis diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityaji, R. (2018). Formulasi strategi pengembangan destinasi pariwisata dengan menggunakan metode analisis SWOT: Studi kasus kawasan pecinan kapasas Surabaya. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(1). Doi:10.26905/jpp.v3i1.2188.
- Atmoko, R. P., Mardiyono dan Sukanto. (2013). Peran pemerintah dalam menciptakan perumahan layak huni (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata ruang, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 120–127.
- Fadisa, N., Syamsurizaldi dan Koeswara, H. (2022). Pembangunan pariwisata berkelanjutan pada Kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 73. Doi:10.20527/jpp.v3i2.3985.
- Firdaus, R. (2020). Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(2), 61–71.
- Komariah, N., Saepudin, E. dan Yusup, P. M. (2018). Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 158–174. Doi:10.26905/jpp.v3i2.2340.
- Meray, J. G., Tilaar, S. dan Takumansang, E. D. (2016). Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas. *SPASIAL: Perencanaan Wilayah & Kota*, 3(3), 47–55. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/13429>.
- Morissan. (2019). Pembangunan kepariwisataan dan perubahan sosial. *Mediakom: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 155–164. Doi:10.35760/mkm.2019.v3i2.2336.
- Munawaroh, N. (2019). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik. *Jurnal Media Birokrasi*, 1(2), 143–156.
- Oktami, D. A. A. P. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata Bahari Di Pulau Kapoposang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Palimbunga, I. P. (2017). Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian pariwisata budaya. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*, 01(02), 15–32. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/236290/bentuk-partisipasi-masyarakat-dalam-pengembangan-pariwisata-di-kampung-wisata-ta>.
- Permatasari, I. (2022). Peran model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community based tourism) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan (Sustainable tourism) di Bali. <https://doi.org/10.22225/Kw.16.2.2022.164-171>, pp. 164–171.
- Rahmi, S. A. (2016). Pembangunan pariwisata dalam perspektif kearifan lokal. *Reformasi*, 6(1), 76–84.
- Rukini, P. S. A. dan Nawangsih, E. (2015). Peramalan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Bali tahun 2019: Metode ARIMA. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 8(2).
- Sahadula, F. J. et al. (2017). Manam' Mi: Pembangunan berbasis kearifan lokal studi pada masyarakat miangas. *KRITIS: Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin*, 26(2), 144–175.
- Simarmata, J. (2015). Perspektif kebijakan daerah dalam konteks UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan terkait. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 1–34.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Walakula, Y. B. (2020). Analisis eksistensi pariwisata Indonesia di tengah situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid19). *NOUMENA: Ilmu Sosial Keagamaan*, 1(1), 47-52.
- Welasari dan Ardieansyah. (2015). Analisis partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Makeruh Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Wedana*, 1(2), 259-273.
- Widyawati, C. (2018). Peranan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata heritage di Trowulan. *Jurnal Pariwisata*, 5(2), 83-94. Doi:10.31311/par.v5i2.3489.